

SIARAN PEDESAAN RRI PURWOKERTO, 1970-1990-AN

Mustika Ratna Prabasanti

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
mustikaprabasanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Siaran Pedesaan Radio Republik Indonesia Purwokerto (RRI Purwokerto) yang jangkauan siarannya meliputi wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Rentang waktu yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah tahun 1970-1990-an karena dalam periode itulah banyak hal yang dapat dicermati, baik terkait gagasan program siaran, kreativitas produk siaran, maupun pelaksanaan siaran. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk: (1) mengungkap keberadaan dan peran RRI Purwokerto dalam kebijakan pembangunan pedesaan masa Orde Baru, (2) menggali kreativitas yang dihasilkan RRI Purwokerto dalam memproduksi Siaran Pedesaan sehingga ditempatkan sebagai program unggulan, (3) mengetahui respons masyarakat terhadap program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Secara ringkas hasil penelitian sebagai berikut: (1) RRI Purwokerto sebagai bagian dari institusi pemerintah memiliki kewajiban memberi dukungan terhadap program pembangunan ekonomi nasional yaitu tercapainya swasembada pangan, (2) dukungan RRI Purwokerto terhadap program tersebut berupa program Siaran Pedesaan, (3) bentuk-bentuk kreativitas yang dihasilkan RRI Purwokerto dalam mengemas Siaran Pedesaan untuk menarik minat masyarakat petani, sehingga dijadikan program unggulan (4) respon masyarakat terhadap program Siaran Pedesaan disambut sangat positif dan masyarakat semakin memahami pentingnya program tersebut, hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya pembentukan kelompen/kelompencapir di Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, RRI Purwokerto melalui program Siaran Pedesaan telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: Siaran Pedesaan, RRI Purwokerto, Kreativitas, Kelompen/Kelompencapir

Abstract

This research discusses the RRI Purwokerto Rural Broadcasts from 1970-1990s, whose broadcast coverage covered the Banyumas Regency and surrounding areas. The time period that is the focus of this research is the 1970-1990s because in that period there are many things that can be observed, both related to broadcast program ideas, broadcast product creativity, and broadcast implementation. Therefore, the aims of this research are: (1) to reveal the existence and role of RRI Purwokerto in rural development policies during the New Order era, (2) to explore the creativity produced by RRI Purwokerto in producing rural broadcasts so that it is placed as a superior program, (3) to find out the response community towards RRI Purwokerto's rural broadcast program. The method used in this research is a historical research method which includes heuristic stages, source criticism, interpretation and historiography. In summary, the research results are as follows: (1) RRI Purwokerto as part of a government institution has an obligation to provide support for the national economic development program, namely achieving food self-sufficiency, (2) RRI Purwokerto's support for this program is in the form of a rural broadcast program, (3) forms of the form of creativity produced by RRI Purwokerto in packaging rural broadcasts to attract the interest of the farming community, so that it becomes a superior program (4) the public response to the rural broadcast program was welcomed very positively and the public increasingly understands the importance of the program, this is proven by the increasing development of the formation of group groups/groups. in Banyumas Regency. In this way, RRI Purwokerto through the Rural Broadcasting program has contributed to rural economic development in Banyumas Regency.

Keywords: *Rural Broadcasting, RRI Purwokerto, Creativity, Kelompen/ Kelompencapir.*

PENDAHULUAN

Peranan radio di Indonesia hingga tahun 1990-an sangat penting, termasuk di negara-negara berkembang lainnya seperti Brasil dan Filipina, sebab radio merupakan kekuatan sarana komunikasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Radio memiliki program, seperti hiburan, berita dan informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Radio mampu menyebarkan informasi dengan cepat dan mampu menembus wilayah-wilayah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau melalui media lain. Di samping itu radio dianggap efektif untuk membantu masyarakat buta huruf yang tinggal di pedesaan untuk mendapatkan informasi (Donald Bogue, dkk, 1979: 1-4).

Sejak pasca kemerdekaan sampai akhir tahun 1980-an radio menjadi media elektronik utama sebelum menjamurnya televisi di kalangan masyarakat pedesaan. Radio dinilai sebagai media informasi yang efektif, cepat dan murah. Melalui siaran radio dapat difungsikan sebagai media propaganda politik (Philo C. Wasburn, 1992:15) juga propaganda ekonomi. Oleh karena itu, radio milik negara tentunya di bawah kendali pemerintah, namun bukan berarti radio non pemerintah (swasta) bisa bergerak bebas tanpa rambu-rambu kebijakan.

Sejarah singkat berdirinya radio di Indonesia diawali oleh lahirnya perkumpulan siaran radio di Jakarta yang disebut *Bataviasche Radio Vereeniging* (BRV) tahun 1925 yang didukung para wartawan dan pengusaha Belanda dan diikuti berdirinya beberapa radio swasta lainnya. Baru pada tahun 1942 pada saat pemerintah pendudukan Jepang semua stasiun radio dipusatkan di bawah kendali Departemen Propaganda dan Informasi pemerintah yaitu *Jakarta Hosokyoku*. *Jakarta Hosokyoku* memegang kendali bagi stasiun-stasiun *Hosokyoku* di kota lain. Kekalahan Jepang oleh sekutu mendorong Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi kemerdekaan ini, berarti terjadi pengambil alihan kekuasaan pemerintahan dan lain-lain, termasuk berbagai fasilitas penting. Dalam hal ini, delapan (8) stasiun *Hosokyoku* yang ada di Jawa setelah melalui proses pembahasan, dinasionalisasi menjadi Radio Republik Indonesia (RRI) pada 11 September 1945 (Djamalul Abidin Ass, 1989: 44). Adapun ke delapan RRI tersebut adalah RRI Jakarta yang kemudian disebut sebagai RRI Pusat, sedangkan lainnya RRI Bandung, RRI Semarang, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Solo, RRI Yogyakarta dan RRI Purwokerto. RRI Bandung, RRI Semarang dan RRI Surabaya sebagai RRI Regional I, sedangkan RRI Purwokerto, RRI Yogyakarta, RRI Solo dan RRI Malang sebagai RRI Regional II (Soegito, 1979:20). Posisi radio di Indonesia tidak boleh dikesampingkan dan patut mendapat apresiasi karena perannya yang berpengaruh dalam sejarah sosial, ekonomi dan politik Indonesia.

Sampai menjelang akhir kekuasaan Presiden Soekarno dinilai semakin meningkatkan guncangan politik dan ekonomi. Instabilitas politik terjadi pada perseteruan antar kelompok dalam kabinet, meletusnya peristiwa G.30 S/PKI,

sampai gerakan demonstrasi mahasiswa menentang kebijakan pemerintah. Dalam sektor ekonomi puncak kecacatan tercermin melonjaknya inflasi mencapai 650 % (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 387-430). Oleh karena itu, bagi pemerintah Orde Baru selaku pemegang kekuasaan selanjutnya, pembangunan stabilitas bidang politik dan ekonomi menjadi prioritas. Terlepas dari kebijakan politik, dalam kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru adalah Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Atas dasar ketetapan tersebut langkah pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi menjadi hal yang diutamakan. Dalam pembangunan ekonomi nasional sektor pertanian menjadi titik sentral perhatian pemerintah. RRI sebagai institusi pemerintah dilibatkan dalam pencapaian program ekonomi nasional. RRI menjadi ujung tombak utama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, terlebih masyarakat yang berdomisili di pelosok pedesaan.

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dalam kajian ini penulis mengangkat topik Siaran Pedesaan RRI Purwokerto tahun 1970-1990-an. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap keberadaan dan peran RRI Purwokerto dalam kebijakan pembangunan pedesaan di Kabupaten Banyumas masa Orde Baru, serta bentuk kreativitas yang dihasilkan RRI Purwokerto dalam memproduksi Siaran Pedesaan, sehingga diempatkan sebagai program unggulan. Program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto sangat mendukung kegiatan pertanian di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah metode penelitian sejarah. Dengan metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang sistematis, kritis, terarah dan komprehensif (Gottschalk, terjemahan Notosusanto, 1975: 32).

Tahapan heuristik merupakan tahapan untuk mencari dan mengumpulkan sumber penelitian, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber primer dalam kajian ini diperoleh dari sumber resmi pemerintah, seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas, RRI Purwokerto, dan arsip-arsip RRI Purwokerto. Sumber primer lainnya berupa sumber lisan, yaitu melalui wawancara dengan beberapa narasumber pelaku sejarah dan narasumber ahli. Adapun sumber sekunder diperoleh melalui kajian pustaka buku, surat kabar, majalah, dan artikel yang relevan.

Tahapan kedua dalam metode sejarah adalah kritik sumber yang terdiri dari kritik intern dan ekstern. Kritik intern digunakan untuk mengetahui kredibilitas sebuah sumber yang berkaitan dengan isi sumber. Sementara itu, kritik ekstern berkaitan dengan autentisitas sumber.

Langkah ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi atau tahapan menafsirkan fakta. Dalam hal ini, terdapat dua cara dalam tahapan interpretasi. Pertama, dengan menganalisis atau menguraikan fakta. Kedua, dengan cara sintesis atau menyatukan fakta (Pranoto, 2014: 55-56). Adapun langkah keempat atau terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun dan menulis secara sistematis mengenai fakta yang diperoleh agar mudah dipahami pembaca.

HASIL PEMBAHASAN

A. Kondisi Wilayah dan Perkembangan Siaran Radio

1. Wilayah, Penduduk dan Pusat Administrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas

Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berposisi di wilayah barat daya Jawa Tengah. Tinjauan geografis Kabupaten Banyumas terletak diantara 109⁰ dan 109⁰.30' Bujur Timur dan 7⁰.30' Lintang Selatan. Sedangkan batas wilayah dengan daerah sekitar, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Adapun luas wilayah Kabupaten

Banyumas mencapai 132.759 hektar, terdiri dari 17 kecamatan, 301 desa (Hartati Prawironoto, dkk, 1991: 10-11). Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari tanah pemukiman (perumahan dan fasilitas lain seperti gedung sekolah, stadion, terminal kendaraan dan sebagainya), areal pertanian dan perkebunan, areal hutan negara serta areal yang tidak dimanfaatkan sebagai lahan produktif (rawa dan padang rumput). Menurut perhitungan sampai akhir tahun 1979, jumlah penduduk mencapai 1.225.328 jiwa, serta jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sejumlah 151.479 orang atau 12,362 % dari jumlah penduduk saat itu (BPS Kab. Banyumas, 1980: 370).

Kabupaten Banyumas dikenal dengan sebutan Lembah Serayu. Kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanik muda yang subur dan sebagian berupa persawahan yang sangat luas dan sangat cocok untuk budidaya padi (Sukardi, 2014: 11-12). Secara topografi, wilayah Banyumas merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan) di bagian utara dan dataran rendah di bagian selatan, serta dilalui aliran sungai besar yakni Sungai Serayu. Sungai Serayu yang bermata air dari Kabupaten Wonosobo dan bermuara di Kabupaten Cilacap, dapat memasok kebutuhan air sebagian besar lahan pertanian sawah Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas sudah ada sejak masa pemerintah Kolonial Belanda dan sebagai pusat administrasi pemerintahan di kota Banyumas. Hal tersebut didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2/1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang jatuh pada tanggal 6 April 1582 (Sudarmo dan Purwoko, 2015: 79). Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi, pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dipindah dari kota Banyumas ke kota Purwokerto pada 7 Januari 1937 (Arinda, Saraswati, dan Muntholib, 2017: 14). Dimulai saat masa pemerintahan bupati RAA Sudjiman Gandasubrata (1933-1950) sampai dengan sekarang (*Bupati-bupati Banyumas 2014*: Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Banyumas). Pada masa Orde Baru, secara administratif kota Purwokerto terdiri dari 4 kecamatan, yakni kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Purwokerto Barat dan kecamatan Purwokerto Utara, yang terdiri dari 28 kelurahan (BPS Kab. Banyumas, 1980: 204). Kota administratif Purwokerto merupakan pusat aktivitas

terbesar di wilayah Kabupaten Banyumas. Selain sebagai pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Banyumas, juga sebagai pusat aktivitas bidang ekonomi, pendidikan dan budaya (Prawironoto, dkk, 1991: 11).

2. Perkembangan Sistem Komunikasi Radio dan Lahirnya RRI Purwokerto

Membahas tentang perkembangan media komunikasi, tidak bisa lepas dari perkembangan sistem komunikasi radio. Hadirnya radio sebagai alat komunikasi berkaitan dengan keberhasilan Guglielmo Marconi yang berhasil menemukan sinyal nirkabel transatlantik pertama pada 12 Desember 1901. Dalam perkembangan selanjutnya tentu akan sangat memengaruhi sistem komunikasi internasional, karena radio berperan sebagai alat propaganda politik dan konstruksi simbolis realitas politik (Philo C. Wasburn, 1992: 15-16). Di Indonesia, radio terbukti menjadi faktor yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Sejak zaman kolonial sampai masa Orde Baru, radio selalu memainkan peran yang sangat signifikan dalam perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial.

Di Kabupaten Banyumas, posisi wilayah pemukiman penduduk, areal pertanian maupun perkebunan rakyat, tidak berada dalam satu kawasan, namun tersebar pada masing-masing desa. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya sistem komunikasi yang fleksibel dan efektif antara pemerintah dengan masyarakat, dalam memberi informasi dan menerima informasi. Radio menjadi salah satu solusinya, karena melalui siaran radio dengan cepat dan serentak mampu menjangkau seluruh wilayah.

Di Kabupaten Banyumas sistem komunikasi radio sudah ada sejak masa pendudukan Jepang, yakni stasiun penyiaran *Purwokerto Hosokyoku* (Soegito, 1979: 15). Gema proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandakan terjadinya peralihan kekuasaan dari tangan penjajah ke tangan bangsa Indonesia, termasuk segala fasilitas yang ada di Indonesia. Pada 11 September 1945, bersama *Hosokyoku* kota lain di pulau Jawa yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya dan Malang, *Purwokerto Hosokyoku* mengalami nasionalisasi menjadi Radio Republik Indonesia (Djamalul Abidin Ass, 1989: 44). Dengan demikian, *Purwokerto Hosokyoku* menjadi tonggak bagi lahirnya RRI Purwokerto.

Keberadaan RRI Purwokerto mengalami pasang surut karena dipengaruhi oleh perkembangan politik di Indonesia. RRI Purwokerto beroperasi mulai September 1945 sampai Agustus 1948. Selanjutnya, bergabung dalam RRI Jawa Tengah yang berkedudukan di Magelang. Mulai awal tahun 1950, RRI Purwokerto bergabung dengan RRI Yogyakarta sampai dengan awal tahun 1964. Dengan demikian, RRI Purwokerto bisa beroperasi kembali secara mandiri di Purwokerto – dengan segala keterbatasannya pada 20 Mei 1964, bertempat di bekas gedung kesenian “Sri Surya.”

Setelah pemerintah Orde Baru berkuasa, mulai Pelita I diadakan pembenahan-pembenahan di berbagai sektor termasuk penambahan tenaga kerja hingga mencapai 81 orang termasuk tenaga honorer (Soegito, 1979: 28). Tak hanya masalah tenaga kerja saja, tetapi juga kekuatan daya pemancar juga ditambahkan. Jika pada awal kemerdekaan hanya memiliki sebuah pemancar SW yang berkekuatan 25 watt, maka pada saat diudarakan kembali di tahun 1964, ditambah menjadi 75 watt. Kemudian, semakin meningkat pada dari waktu ke waktu hingga mencapai 1 KW. Selain itu, ditingkatkan lagi dengan sebuah pemancar MW yang kekuatannya hingga mencapai 10 KW.

Pemancar itu terletak di wilayah Jompo Kulon dan pengoperasiannya mulai tahun 1976. Selanjutnya, disusul dengan pengadaan sebuah mobil unit yang dilengkapi dengan pemancar, studio bicara serta *equipment* lainnya untuk keperluan-keperluan siaran yang berada di luar radio (Soegito, 1979: 28-29). RRI Purwokerto di bawah koordinasi RRI Pusat mengacu pada kebijakan siaran yang digariskan oleh Direktorat Radio, Televisi dan Perfilman. RRI Purwokerto berposisi sebagai stasiun Regional II selain harus memenuhi kewajiban terhadap RRI Pusat juga memiliki program sendiri.

Sebagai stasiun penyiaran regional RRI Purwokerto memiliki beberapa program, yakni Siaran Pedesaan, Siaran Berita Daerah, Siaran Pendidikan, dan Kesenian Tradisional. Untuk program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto dimulai tahun 1968, dengan durasi tayang dua kali dalam seminggu yaitu hari Senin dan Kamis dengan waktu siaran mulai pukul 05.15 WIB hingga pukul 05.45. Padamalam

harinya, siaran dimulai pada pukul 18.30 sampai dengan pukul 19.00WIB. Adapun materi siaran sebagian besar di titik beratkan kepada masalah-masalah pertanian.

Dalam penyelenggaraan Siaran Pedesaan ini masih sangat sederhana, dari mulai teknik penyajian hingga isi beritanya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dialek Banyumasan agar lebih komunikatif bagi sebagian besar masyarakat. Hal tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Radio yang menghendaki adanya upaya mensukseskan pembangunan, dengan melalui siaran yang bisamemunculkan simpati rakyat, dan memberikan partisipasinya. Oleh karena itu, topik-topik yang disajikan memiliki tujuan untuk menunjang kepentingan pembangunan melalui Siaran Pedesaan. Berita daerah dari RRI Purwokerto, disiarkan selama dua kali dalam sehari. Adapun sumber berita utama yang disiarkan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, misalnya bencana alam, kegiatan-kegiatan ekonomi, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial budaya.

B. Orde Baru dan Munculnya Ide “Siaran Pedesaan”

1. Swasembada Pangan dan Kebijakan Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan dilatarbelakangi oleh ketimpangan antara desa dengan kota. Ketimpangan tersebut mendorong negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap pembangunan desa, diawali dengan aktivitas meningkatkan produksi-produksi pertanian (Imam Harjanto, 2011: 131). Pembangunan pedesaan di Indonesia telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak awal kemerdekaan. Namun, dalam pelaksanaannya, strategi pembangunan di pedesaan masih sering mengalami kendala terutama masalah pendanaan.

Akhir pemerintahan Presiden Soekarno menyisakan derita ekonomi yang sangat parah. Kondisi ini tercermin dengan melambungnya inflasi di akhir tahun 1966 sebesar 650% (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 430). Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Soeharto berupaya menata kembali perekonomian nasional

menjadi salah satu skala prioritas. Landasan berpijak pemerintah Orde Baru adalah Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 431). Berlandaskan ketetapan tersebut, Pemerintah Orde Baru dalam membangun kekuatan ekonomi mandiri melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap satu (Repelita I), melakukan usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat.

Bidang pangan di Indonesia yaitu “beras” seolah-olah bisa mewakili jenis-jenis bahan pokok pangan yang lain. Ini terbukti pada tahun 1967 musim kering panjang melanda Asia Tenggara yang berakibat gagal panen, termasuk Indonesia. Krisis beras tahun 1967 mengisyaratkan para perumus kebijakan, bahwa program penyediaan beras memegang peranan utama dalam kebijakan stabilisasi bahan pokok pangan secara keseluruhan, dengan bobot 31% dari kebutuhan bahan pokok pangan lainnya (Mears dan Moeljono dalam Anne Booth dan Peter McCawley, 1990: 39). Oleh karena itu, mulai tahun 1968 pemerintah berkonsentrasi penuh untuk mencukupi ketersediaan beras.

Adapun langkah yang diambil antara lain berusaha untuk mencukupi sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan, seperti mencukupi kebutuhan alat pertanian, kebutuhan pupuk, rehabilitasi dan pengadaan infrastruktur pertanian misalnya bendungan/waduk, memasyarakatkan bibit padi unggul dan tak kalah penting menggalakan para petani agar memiliki pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan pertanian. Pengetahuan tersebut bisa didapat melalui kegiatan Bimas/Inmas maupun program Siaran Pedesaan RRI. Sehingga pada tahun awal Repelita I pertumbuhan produksi beras terjadi peningkatan rata-rata 4,4% hingga 4,5% (Booth dan McCawley, 1990: 47) pada tahun 1969, 1970, 1971. Diharapkan pula dengan penguasaan pengetahuan pertanian yang lebih luas, para petani mampu mengembangkan kegiatan pertaniannya pada sektor produksi bahan pokok pangan yang lain di luar produksi padi.

Kabupaten Banyumas memiliki lahan pertanian yang subur. Kondisi ini tidak lepas dari perhatian pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat pedesaan atau *rural development*, dengan kegiatan awal yang berkaitan

dengan produktivitas pertanian (Rina Rahayu, 2016: 130). Desa merupakan sumber penghasil bahan pokok pangan, hal ini karena berhubungan dengan struktur perekonomian masyarakatnya yang bersifat agraris (Icuk dan Erwin, 2019: 3). Desa merupakan *hinterland*, karena masyarakat desa lebih banyak memproduksi bahan pokok pangan dibanding menjadi konsumen (Booth dan McCawley, 1990: 9). Memang konotasi awal mengenai pembangunan desa dianggap identik dengan masalah pertanian (Umar Nain, 2019: 23). Maka dari itu, wilayah Kabupten Banyumas yang memiliki lahan pertanian produktif pada tahun 1970 pernah mendapat kunjungan inkognito dari Presiden Soeharto ke desa-desa (Mahpudi, 2014: 32). Tentu saja tujuan kunjungan ini untuk melihat secara langsung pelaksanaan pembangunan infrastruktur pertanian yang ada di Kabupaten Banyumas, seperti proyek bendungan Tajum yang merupakan implementasi sebagian program Repelita I, khususnya pada bidang pembangunan pertanian.

Selain itu, dalam pembangunan pertanian, produksi padi merupakan program prioritas utama dalam Pelita I. Maka untuk menunjang pencapaian program dibentuk program Bimas, tingkat nasional hingga tingkat kecamatan. Program ini memperkenalkan serta memperluas penggunaan teknologi pertanian yang baru (Nor Huda, 2011: 67). Bagi masyarakat pedesaan Banyumas, adanya perhatian pemerintah dalam soal pembangunan desa memberi keuntungan besar dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

2. Gagasan dan Format Siaran Pedesaan RRI Purwokerto

Sudah sejak tahun 1950-an, banyak pemerintahan di negara-negara berkembang seperti Brasil, Filipina, termasuk Indonesia menerapkan dan memanfaatkan siaran radio yang bertujuan untuk menyebarkan pesan-pesan pembangunan terutama yang berkaitan dalam bidang pertanian kepada masyarakat pedesaan (Onong Uchana, 2009: 88). Di Indonesia, siaran pertanian secara aktif dilakukan dan berorientasi pada tujuan nasional, seperti bagaimana cara memanfaatkan lahan, pengenalan teknologi pertanian dan lain sebagainya. Oleh karena banyak masyarakat petani yang tinggal di pedesaan, maka lembaga penyiaran di pedesaan harus memiliki kompetensi pertanian dan sebagai

komunikator yang efektif, terutama setelah berkembangnya Radio *Farm Forum* (Onong Uchana, 2009: 89). Radio memiliki peran penting dalam penyampaian informasi terhadap kelompok pendengar sebagai acuan mereka dalam melaksanakan kegiatan pertanian (Savitri, 2014: 37). RRI Purwokerto memunculkan sebuah kreativitas berupa Siaran Pedesaan. Program Siaran Pedesaan disampaikan sebagai bentuk propaganda ekonomi kepada masyarakat agar bisa tercapai swasembada pangan. Ternyata konsep ini juga dipakai di nagara lain seperti di Cekoslovakia, dengan menyiarkan program Siaran Pedesaan untuk meningkatkan bidang pertanian hingga produksi nasional (Jarlovs Kostal, 1979: 67).

Program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto berawal dari suatu “Program Acara bernama Obrolan Pak Singa yang dimulai 10 Oktober 1968”, jelas Wahyu Hardiatana, pensiunan pegawai RRI Purwokerto sekaligus putra dari pemeran Pak Singa, pada 10 Juli 2023 di Purwokerto. Pak Singa merupakan nama tokoh dalam acara siaran tersebut. Pemeran tokoh Pak Singa bernama Soemarno Wiryodiharjo yang berprofesi sebagai penyiar senior RRI Purwokerto. Di samping itu, juga melibatkan pemeran tokoh-tokoh lain dalam acara Obrolan Pak Singa seperti Paman Karya, Wak Tamamad, Mbekayu Gembrot dan sebagainya. Inti acara Obrolan Pak Singa tersebut seputar “gendu-gendu rasa (ajakan) untuk meningkatkan cara bertaninya agar hasil meningkat pula”, sambung Wahyu Hardiatana. Acara Obrolan Pak Singa disiarkan setiap hari Kamis pukul 21.00-10.00 WIB. Acara Obrolan Pak Singa semakin mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga tim pengelola acara berinisiatif untuk mendapatkan nama-nama dan alamat para pendengar. Adapun cara yang ditempuh para peserta pendengar untuk mengirim nama dan alamat melalui kantor pos. Setelah data peserta pendengar didapat dari kantor pos, maka setiap acara siaran peserta pendengar bisa disapa yang diselingi dengan lagu hiburan. Dengan cara tersebut, peserta pendengar acara Obrolan Pak Singa semakin meningkat.

Seiring dengan program pemerintah bidang ekonomi yakni mewujudkan swasembada pangan RRI Purwokerto sebagai bagian dari institusi pemerintah memberi dukungan atas pencapaian program tersebut. Terkait hal tersebut, Acara Obrolan Pak Singa oleh seorang penyiar senior bernama Setyo Tamtomo

mengusulkan agar “Acara Obrolan Pak Singa diubah dan dikembangkan menjadi Program Siaran Pedesaan”, jelas Setyo Tamtomo, pensiunan penyiar RRI Purwokerto, pada 10 Agustus 2023 di Purwokerto. Dengan demikian, acara Obrolan Pak Singa merupakan tonggak terbentuknya Siaran Pedesaan RRI Purwokerto. Adapun SK dari pemerintah terbit pada tahun 1969, yaitu SK Menteri Pertanian dan Menteri Penerangan No 2 Tahun 1969 tentang Siaran Pedesaan mulai dilaksanakan dengan bekerjasama antara Departemen Pertanian beserta Direktorat Penyuluhan, Departemen Penerangan bersama RRI Pusat (Jakarta) pada tanggal 24 September 1969 (Djoko Waluyo, 1993: 20). Dengan demikian, Siaran Pedesaan RRI Purwokerto dilaksanakan lebih awal dibanding dengan terbitnya SK dari pemerintah, sehingga RRI Purwokerto merupakan pelopor bagi RRI lain dalam pelaksanaan program Siaran Pedesaan.

Guna meningkatkan kualitas produk siaran, baik yang menyangkut variasi dan kedalaman materi, jangkauan pendengar maupun teknis kemasan produk, “RRI Purwokerto mengadakan kerja sama dengan instansi lain terkait seperti Dinas Pertanian”, jelas Rica Diana Tersna, pensiunan pegawai RRI Purwokerto sekaligus pengasuh Siaran Pedesaan, pada 20 Agustus 2023 di Purwokerto. Didi Supriyadi, pensiunan penagawai (penyuluh) Dinas Pertanian penyusun naskah siaran, pada 5 September 2023 di Purwokerto, menuturkan bahwa format naskah Siaran Pedesaan dikemas dalam bentuk drama, sehingga terkesan seperti sedang ada kegiatan pembelajaran tentang pertanian. Selain itu Titik Sunarti, pensiunan pegawai (penyuluh) Dinas Pertanian dan pengasuh Siaran Pedesaan, pada 20 September 2023 di Purwokerto, menjelaskan agar mudah diterima masyarakat maka siaran dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumasan. Kemudian, Titik Sunarti memberi contoh perkataan dalam Siaran Pedesaan sebagai berikut,

“...esih esuk kie Bapak-Bapak karo Ibu-Ibu Tani, lagi pada ngapa kiye ya esuk-esuk, ealah kae ati-ati kue lha risbane mbok pada njeblos, wis pada depupuki apa urung kue tanamane, dewek kue kudu sering-sering nggatekna tanemane dewek supaya kindar saka hama-hama sing pada teka...”

Dengan penggunaan bahasa yang disesuaikan adat dan budaya Banyumas, maka inti dari materi siaran mudah diterima masyarakat. Di samping itu, naskah

Siaran Pedesaan ditulis dengan bahasa lokal juga ditulis dengan bahasa Sunda, karena jangkauan siaran mencapai wilayah Jawa Barat bagian timur seperti Kabupaten Ciamis bagian timur dan sebagian wilayah Kabupaten Kuningan dan Cirebon bagian tenggara. Dalam Siaran Pedesaan berbahasa Sunda, Rica Diana Tresna memberi contoh percakapan pembuka siaran,

“Alo-alo tani sareng warga wilujang patepang deui acara Gerbang Desa RRI Purwokerto wilujeng ngadangukeun...”

“Alo-alo tani sareng warga pedesaan, kumaha wartosna...”

“Teh alo-alo tani kangge wengi ie, mbi sareng mang bade medarkeun ngeunaan pembibitan kalapa, teh panginten sabagia..”

Dengan berbagai upaya dilakukan oleh para pengasuh Siaran Pedesaan RRI Purwokerto, dengan maksud agar minat masyarakat mengikuti acara siaran tersebut terus meningkat. Harapan lebih lanjut masyarakat petani punya pengetahuan dan keterampilan dan bisa diterapkan dalam kegiatan pertaniannya agar mampu meningkatkan hasil panennya.

C. Respons Masyarakat terhadap Program Siaran Pedesaan

1. Terbenrtuknya Kelompok Pendengar secara Mandiri

Atas dasar SK Menteri Pertanian dan Menteri Penerangan No. 2/1969 tentang Siaran Pedesaan, maka untuk wilayah Kabupaten Banyumas atas dorongan Departemen Pertanian kabupaten terbentuklah Kelompok Pendengar (Kelompen) secara mandiri di berbagai desa di Kabupaten Banyumas. Adapun anggotanya berawal dari para pendengar dan simpatisan acara Obrolan Pak Singa. Menurut catatan Titik Sunarti, jumlah kelompok pendengar di Kabupaten Banyumas yang terbentuk pada periode awal tahun 1969 terdiri dari 42 kelompok pendengar dengan anggota 35-60 orang setiap kelompok pendengar. Dan sampai dengan awal tahun 1980, jumlah kelompok yang terbentuk ada 510 kelompok pendengar. Kondisi ini juga diikuti kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah, sehingga akhir tahun 1985 kelompok pedengar yang ada di Jawa Tengah mencapai 44.006 kelompok pendengar (Putri Edtrieka Sari, 2016: 32).

2. Mengenalkan Teknologi Baru Bidang Pertanian

Siaran Pedesaan RRI Purwokerto memberi bekal pengetahuan dan

ketrampilan dalam tata cara bertani. Didi Supryadi, pensiunan penyuluh Pertanian Kabupaten Banyumas di Purwokerto pada 5 September 2023, menjelaskan bahwa dalam rangkaian Siaran Pedesaan RRI Purwokerto, penyuluh pertanian diujikan ke lapangan untuk memperkenalkan alat-alat pertanian modern. Dalam hal ini, dapat dipahami agar para petani mau dan mampu mengoperasikan alat-alat pertanian modern, sehingga pekerjaan lebih efektif baik tenaga, waktu dan biaya. Sebagai contoh, yang semula lahan sawah dikerjakan dengan cangkul atau dibajak dengan bajak sapi atau kerbau, selanjutnya beralih dikerjakan dengan bajak traktor. Termasuk sampai pengelolaan hasil panen, misalnya yang semula memproduksi beras dengan munumbuk padi/gabah dengan lesung dan alu, maka beralih ke mesin penggiling padi jadi beras atau *selep*. Dengan demikian, Siaran Pedesaan RRI Purwokerto dapat memberi warna bagi kegiatan pertanian di Kabupaten Banyumas khususnya.

KESIMPULAN

Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah 132.759 hektar dengan jumlah penduduk sampai tahun 1980-an sebanyak 1.225.328 jiwa. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani mencapai 151.479 orang (12,362%) dari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 1980. Wilayah Banyumas memiliki lahan pertanian yang subur dan sebagian besar lahan persawahan yang sangat cocok untuk budidaya padi. Pusat administrasi pemerintah Kabupaten Banyumas berada di kota Purwokerto sejak tahun 1937.

Perkembangan sistem komunikasi radio di wilayah Banyumas sudah berkembang sejak masa pendudukan Jepang yaitu *Purwokerto Hosokyoku*. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, semua *Hosokyoku* yang ada di Jawa dinasionalkan menjadi RRI pada 11 September 1945. Oleh karena itu, *Purwokerto Hosokyoku* menjadi cikal bakal RRI Purwokerto. Kehidupan RRI Purwokerto memang mengalami pasang surut dikarenakan kondisi politik di Indonesia. Pada 1948-1949, RRI Purwokerto pernah bergabung dengan RRI Jawa Tengah di

Magelang, dan pada awal tahun 1950 bergabung dengan RRI Yogyakarta. RRI Purwokerto bisa beroperasi sendiri di Purwokerto pada 20 Mei 1964.

Pada masa kekuasaan pemerintah Orde baru, RRI Purwokerto sebagai bagian dari institusi negara banyak melibatkan diri dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Keterlibatan yang dimaksud untuk memberi dukungan terhadap pencapaian swasembada pangan di Kabupaten Banyumas. Peran utama yang diberikan melalui program Siaran Pedesaan.

Program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto sudah dimulai sejak tahun 1968, meskipun nama program belum Siaran Pedesaan tetapi disebut acara Obrolan Pak Singa. Acara Obrolan Pak Singa menjadi dasar terbentuknya program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto, setelah pemerintah menurunkan SK Menteri Pertanian dan Menteri Penerangan No.2/1969 tentang Siaran Pedesaan.

Respons masyarakat Banyumas dan sekitarnya sangat positif terhadap program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto. Hal ini dibuktikan semakin berkembangnya pembentukan kelompen/kelompencapir di berbagai wilayah desa di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, kreativitas produk siaran terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas siaran. Keterlibatan instansi lain seperti Departemen Pertanian dan Perguruan Tinggi sangat memberi dampak positif terhadap kualitas produk siaran. Dengan demikian, Siaran Pedesaan bisa diposisikan sebagai program unggulan RRI Purwokerto.

Program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto telah membawa warna baru dalam pengelolaan bidang pertanian. Hal ini menjadi bukti kontribusi RRI Purwokerto dalam memberi dukungan terhadap upaya pencapaian swasembada pangan di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Ass., Djamalul. 1989. *Sekali di Udara Tetap di Udara: 40 Tahun Radio Republik Indonesia 11 September 1945-1985*, Jakarta: PT Galva Corporation

- Arinda, Diska Meizi, Ufi Saraswati dan Abdul Muntholib. 2017. "Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935 Sampai Perpindahan Pusat Pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto Tahun 1937" dalam *Journal of Indonesian History* 6 (1), Semarang: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNNES.
- Bogue, Donald J., dkk. 1979. *The Use of Radio in Social Development*, USA: University of Chicago.
- Both, Anne dan Peter McCawley. 1990. *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta: LP3ES.
- Edrieka Sari, Putri. 2016. "Kelompokcapir: Motor Penggerak Kreativitas dan Perekonomian Rakyat di Jawa Tengah 1984-1998". *Skripsi*, Depok: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Harjanto, Imam. 2011. *Teori Pembangunan*, Malang: UB Press.
- Huda, Nor. 2011. "Revolusi Hijau dan Gerakan Petani di Magelang Pada Masa Akhir Orde Baru", *Tesis*, Yogyakarta: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahpudi. 2014. *Incognito Pak Harto Perjalanan Diam-diam Seorang Presiden Menemui Rakyatnya*, Jakarta: Yayasan Harapan Kita.
- Nain, Umar. 2019. *Pembangunan Desa dalam Prespektif Sosio Historis*, Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Penulis. *BPS Kabupaten Banyumas 1980*. Purwokerto: Kantor BPS Kab. Banyumas.
- Penulis. *Bupati-bupati Kabupaten Banyumas*. 2014. Purwokerto: Dinas Arsip dan Perputakaan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranoto, Suhartono W. 2014. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Prawironoto, Hartati, dkk. 1991. *Dampak Masuknya Media Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan Jawa Tengah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- Rahayu, Rina. 2016. "Siaran Pedesaan dan Transformasi Sosial Ekonomi di Pedesaan Yogyakarta Tahun 1968 sampai 1990-an", *Tesis*, Yogyakarta: Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Rangga Bawono, Icku dan Erwin Setuadi. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Savitri, Carissa Nurrahma. 2014. "Hubungan Antara Program Siaran Gerbang Desa dengan Sikap Bertani Anggot Gabungan Kelompok Tani Lestari Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, Purwokerto :Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNSOED.
- Soegito. 1979. *RRI Purwokerto Selintas*, Purwokerto: PT Trio Argo Kencana.
- Sudarmo, M.W.R. dan B.S. Purwoko. 2015. *Sejarah Banyumas dari Masa ke Masa: Sejak Akhir Abad ketiga sampai Bupati Pilihan Rakyat*, Purwokerto: Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Sukardi, Tanto. (2014). *Tanam Paksa di Banyumas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Uchana, Onong. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Waluyo, Djoko. 1993. *Penelitian Profil Kelompencapir Ganda Mekar : Peranannya dalam Penyebaran Informasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum DKI Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan RI.

Wawancara dengan Narasumber

- Wawancara. Wahyu Hardiatana, Purwokerto. 10 Juli 2023. Pukul. 09.30-12.00 WIB.
- Wawancara. Setyo Tamtomo. Purwokerto. 10 Agustus 2023. Pukul. 12.30-14.15 WIB.
- Wawancara. Rica Diana Tresna. Purwokerto. 20 Agustus 2023. Pukul. 10.00-12.30 WIB.

Wawancara Didi Supriyadi. Purwokerto. 5 September 2023. Pukul. 10.00-12.30 WIB.

Wawancara Titik Sunarti. Purwokerto. 20 September 2023. Pukul. 09.00-11.00 WIB.